

**PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR**

Abdi Surya Pratama

NPP. 30.0223

Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: abdiisurya2330@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP, M.A

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the emergence of various phenomena of problems related to Community Organizations ranging from thuggery, black mailling, and clashes between Community Organizations in Kampar district which can disturb Public Order and Peace. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the guidance carried out by the National and Political Unity Agency on Community Organizations so that the realization of Peace and Public Order in Kampar Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the Coaching of Community Organizations carried out by the National Unity and Political Agency of Kampar Regency is good, but in the Coaching carried out on Community Organizations there are still things that hinder it such as the non-existent legal umbrella, Administration that has not been fully completed by Community Organizations, and the time and place of coaching Community Organizations. The inhibiting factor in the Development of Community Organizations carried out by the National Unity and Political Agency where the place is not always adequate for Kesbangpol in conducting community organizations and the time that sometimes still clashes between the National Unity and Political Agency and Community Organizations so that the Development of Community Organizations in realizing Peace and Public Order in Kampar Regency is sometimes still hampered. **Conclusion:** Coaching provided to Community Organizations in the form of increasing organizational insight, placing work programs, developing member sensitivity as a forum, accommodating aspirations, strengthening the vision and mission of community organizations. In Coaching Community Organizations by the National Unity and Political Agency, various processes are carried out starting from registration, reporting on the activities of Community Organizations, the process of inviting Community Organizations to be able to attend coordination meetings, socialization of Community Organization Coaching which presents leaders and young people in Kampar district. The National Unity and Political Agency also made updates by utilizing digitalization to make it easier for Community Organizations who wanted to register themselves and evaluation meetings by grouping Community Organizations according to their fields to welcome the 2024 elections, not only that Kesbangpol also invited Community Organizations to use social media to provide a good view of the

community. In order for coaching to run well, the author suggests that the National Unity and Political Agency provide convenience in reporting community organization activities by utilizing an electronic-based system.

Keywords: Community Organization, Development, Peace and Public Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang munculnya berbagai fenomena permasalahan terkait Organisasi Kemasyarakatan mulai dari Premanisme, *black mailling*, serta bentrokan antar Organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Kampar yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pembinaan yang dilakukan Badan kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan sehingga bisa terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kampar.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kampar sudah baik, namun dalam Pembinaan yang dilakukan terhadap Organisasi Kemasyarakatan masih ada hal-hal yang menghambatnya seperti payung hukum yang tidak ada, Administrasi yang belum seluruhnya dilengkapi Oleh Organisasi Kemasyarakatan, dan waktu dan tempat pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Faktor penghambat dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana tempat yang tidak selalu memadai untuk Kesbangpol dalam melakukan Organisasi masyarakat dan Waktu yang kadang kala masih berbentrok antara Badan Kesatuan bangsa dan politik dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kampar terkadang masih terhambat.

Kesimpulan: Pembinaan yang diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan berupa peningkatan wawasan organisasi, penempatan program kerja, menumbuhkembangkan kepekaan anggota sebagai wadah, penampung aspirasi, penguatan visi dan misi organisasi kemasyarakatan. Dalam Pembinaan Organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik melakukan berbagai proses mulai dari pendaftaran, pelaporan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, proses pengundangan Organisasi Kemasyarakatan untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi, sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang menghadirkan tokoh-tokoh serta generasi muda di kabupaten kampar. Badan Kesatuan bangsa dan politik juga melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan digitalisasi untuk memudahkan Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mendaftarkan dirinya serta rapat evaluasi dengan pengelompokkan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidangnya guna menyambut pemilu 2024, tidak hanya itu Kesbangpol juga mengajak Organisasi Kemasyarakatan menggunakan *social* media untuk memberikan pandangan yang baik dari masyarakat. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, penulis menyarankan agar Badan Kesatuan bangsa dan politik menyediakan kemudahan dalam pelaporan kegiatan Organisasi masyarakat dengan memanfaatkan sistem berbasis elektronik.

Kata kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan adalah forum di mana asosiasi berkumpul untuk mencapai kesepakatan di mana mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan diwakili oleh kelompok kepentingan Sosial, Etnis, Ras, Agama, dan lainnya. Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut Organisasi Kemasyarakatan diartikan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya biasa disebut Ormas adalah sebuah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dengan sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan dari masyarakat yang mempunyai kesamaan dalam hal tersebut yang memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Yang dibuat dengan harapan dapat memajukan persatuan semua jenis perkumpulan dan elemen majelis, mulai dari organisasi semua jenis masyarakat dengan jenis dan bidang kegiatannya masing-masing dalam satu tatanan. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih menjadi keresahan bagi masyarakat yang mana berbagai kasus banyak terjadi mulai dari Blackmailing atau biasa disebut dengan Pemerasan, kasus Premanisme, Bentrokan, serta Radikalisme yang tertapar di dalam Organisasi Kemasyarakatan sehingga ini menjadi hal yang urgent. Organisasi kemasyarakatan di kabupaten Kampar sendiri masih banyak yang menimbulkan berbagai masalah dan kekacauan seperti kasus yang bertentangan dengan Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 dalam Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi “setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan premanisme.” kasus yang sedang hangat mengenai premanisme adalah kasus penutupan sebuah pabrik Decoco dengan nama tirta mulia yang merupakan UMK milik Desa Karya Indah. Ormas yang berada di kabupaten Kampar belum semuanya yang terdaftar di badan kesatuan bangsa dan politik. Yang mana hal tersebut berpotensi menjadi ancaman dan cenderung memberikan dampak buruk pada ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana Ormas yang tidak terdaftar sama sekali tidak memiliki Payung Hukum dan tidak bisa terdeteksi oleh Kesbangpol yang merupakan OPD yang bertanggung jawab terhadap Ormas sehingga hal itu yang menyebabkan Kesbangpol melakukan Pembinaan agar pandangan masyarakat yang muncul tidak pandangan negatif. kabupaten Kampar memiliki 85 Organisasi Kemasyarakatan yang telah mendaftarkan diri di badan kesatuan bangsa dan politik dengan latar belakang yang berbeda beda dan beragam mulai dari latar belakang agama seperti pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) cabang Kampar, berlatar belakang suku seperti forum Batak Intelektual, dan juga ada yang berlatar belakang adat lembaga adat Kampar (LAK).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih menjadi keresahan bagi masyarakat yang mana berbagai kasus banyak terjadi mulai dari Blackmailing atau biasa disebut dengan Pemerasan, kasus Premanisme, Bentrokan, serta Radikalisme yang tertapar di dalam Organisasi Kemasyarakatan sehingga ini menjadi hal yang urgent. Kasus blackmailing atau pemerasan yang merupakan kegiatan kejahatan yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan mengancam serta memberikan tekanan kepada korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak korban. Kasus pemalakan oleh ormas terhadap petugas provider yang sedang memperbaiki jaringan kabel di kawasan Cikareng ormas tersebut melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada 7 orang pekerja dari petugas jaringan tersebut dan menghentikan paksa pekerja untuk melakukan perbaikan jika tidak mau memberikan uang kepada mereka.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan kesatuan Kampar adalah administrasi laporan kegiatan yang harus dilaporkan oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam 6 bulan sekali yang mana itu membantu Kesbangpol untuk menentukan pembinaan apa yang akan dilakukan. Laporan struktur dan visi misi sebuah Ormas juga menjadi penghambat pelaksanaan Pembinaan Organisasi dimana masih belum semua dari Organisasi Kemasyarakatan yang merespon sehingga Administrasi yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pembinaan tidak terpenuhi seluruhnya. tidak adanya payung hukum yang menjadi dasar untuk mengatur Ormas di kabupaten Kampar peraturan juga menjadi faktor penghambat bagi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang mana Perda mengenai Ormas tidak ada hanya sebatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga tidak ada patokan atau dasar yang bisa membatasi secara rinci Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Kampar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bertindak dalam melakukan Pembinaan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi pembinaan maupun studi tentang peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina Organisasi Masyarakat. Penelitian oleh Haditianur yang berjudul Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota sungai penuh dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan peraturan walikota sungai penuh nomor 35 tahun 2019 (Haditianur,2022) menemukan bahwa hasil pembinaan terdapat 60 ormas dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kesbangpol dan kendala yang ditemukan adalah banyak organisasi kemasyarakatan yang belum memahami dengan baik peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian oleh Rudiselwandi yang berjudul Pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten siak (Rudiselwandi,2018) menemukan bahwa pembinaan ormas oleh kesbangpol Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena fokus rencana kerja Kantor Kesbangpol hanya berfokus pada alokasi anggaran untuk fasilitas dan layanan administratif. Penelitian oleh Chandra Wiraharisartika yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan dan penertiban organisasi Kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di kota cimahi provinsi jawa barat (Chandra,2022) menemukan bahwa pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilakukan kesbangpol kota cimahi telah bekerja dengan optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh organisasi masyarakat dan LSM di Kota Cimahi antara lain adalah persaingan kawasan, perselisihan pandangan, struktur organisasi, dan juga adanya tuntutan kepada pemerintah yang belum terpenuhi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Chandra Wirahari Santika tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pembinaan menurut Miftah Thoha. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan juga mengetahui apa saja yang menjadi penghambat pembinaan ormas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Kesbangpol.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kampar. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan oleh badan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kampar.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori pembinaan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha dalam buku Pembinaan Organisasi menjelaskan bahwa pembinaan organisasi ialah suatu Tindakan, kegiatan atau usaha, serta proses untuk menjadi lebih baik dengan berbagai pembaharuan. Pembinaan juga merupakan suatu kaidah yang berlaku yaitu menjelaskan tentang bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana dan pembinaan juga suatu usaha untuk suatu efektivitas dan efisiensi dalam suatu perubahan atau pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Teori ini didukung dengan tiga dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu usaha, proses, dan pembaharuan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Usaha

Usaha adalah sebuah upaya yang dilakukan manusia yang berguna untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu agar terpenuhinya kegiatan yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kesbangpol Kabupaten Kampar telah melakukan pembinaan kepada Ormas dengan mendorong Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan wawasan mengenai visi dan misi organisasinya terutama dari anggotanya Kemudian membimbing Organisasi Kemasyarakatan dalam penempatan program kerja yang akan dilaksanakan organisasi kemasyarakatan serta mengembangkan kemampuan anggota Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat agar ormas mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Usaha yang dilakukan Kesbangpol dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan sudah dilaksanakan dan akan terus kita berikan kepada Organisasi Kemasyarakatan sehingga Ormas-Ormas ini bisa menjadi penyambung atau penghubung kepada masyarakat dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, upaya Kesbangpol melakukan pembinaan dalam Menempatkan organisasi berdasarkan prinsip legalitas, konstitusional yang

diberikan kesbangpol telah baik terlaksana dengan pembinaan visi dan misi organisasi kemasyarakatan, pembinaan anggota kemasyarakatan pembinaan anggota agar timbulnya efek baik yang diberikan Ormas kepada masyarakat ataupun pemerintah.

3.2. Proses

Proses dalam sebuah pembinaan sangatlah penting dimana proses pembinaan Organisasi Kemasyarakatan harus diperhatikan agar tepat sasaran yang mana prosesnya meliputi sosialisasi dengan Ormas serta mengadakan rapat koordinasi dengan Ormas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Proses pembinaan yang dilakukan selalu menghadirkan berbagai tokoh yang berpengaruh di kabupaten Kampar baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak hanya tokoh-tokoh melainkan generasi muda juga ikut dihadirkan. Serta sebelum dilakukannya Pembinaan Sebuah Organisasi Kemasyarakatan harus sudah mendapatkan legalitas yaitu terdaftar serta memiliki SKT dari kemendagri melalui kesbangpol ataupun menkumham. Pendataan Mengenai Laporan Kegiatan yang dilakukan oleh Ormas sampai dengan proses pengundangan ormas untuk dilakukannya pembinaan Ormas yang mana hal ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Ormas terkait ataupun melakukan panggilan terhadap perwakilan Ormas ke kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar

3.3. Pembaharuan

Kesbangpol telah melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang mana berbagai pembaharuan telah dilakukan dengan sudah ada perbaikan disetiap struktur Ormas yang sebelumnya masih belum jelas dan tanggung jawab di dalam Organisasi tersebut, dan beberapa keterampilan dari anggota Ormas sudah berkembang. Banyak nilai positif yang sekarang diberikan oleh Organisasi Kemasyarakatan untuk masyarakat Sekitar, mulai dari Gotong royong, kemudian persiapan Pemilu 2024 sehingga mulai menggiring stigma masyarakat dari yang mulanya buruk menjadi baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kesbangpol telah melakukan usaha Pembinaan kepada Ormas. Yang mana Ormas pada saat ditengah masyarakat merupakan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sangatlah penting untuk perkembangan Ormas, agar Ormas tidak menimbulkan masalah. Berbagai Pembinaan telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik salah satunya berupa pembinaan mengenai penguatan Visi Dan Misi Organisasi Kemasyarakatan yang menjadivadah bagi masyarakat yang benar ingin mengembangkan kemampuan dan aspirasinya. Pembinaan Ormas yang dilakukan berupa peningkatan wawasan organisasi, penempatan program kerja, menumbuhkembangkan kepekaan anggota sebagai wadah, penampung aspirasi, pemuatan visi dan misi organisasi kemasyarakatan serta pelatihan-pelatihan Ormas di bidangnya masing-masing. Proses Pembinaan Organisasi kemasyarakatan sudah baik. Dalam mencapai sebuah tujuan ormas ada tahapan proses yang harus dilakukan Ormas dengan menyetorkan atau melaporkan kegiatan harian yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ke Kesbangpol hingga proses pengundangan Ormas untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi serta Sosialisasi yang dilaksanakan dalam Pembinaan Ormas dimana para tokoh agama masyarakat serta anggota ormas dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan sedangkan dalam berbagai penelitian terdahulu juga melakukan berbagai upaya mengenai penguatan dan visi misi mengenai ormas yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh hadinur (2022) namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan olehnya ada terdapat perubahan dikarenakan ormas yang ada di sungai penuh sudah mampu menjalankan yang namanya laporan kegiatan dengan baik selama 6 bulan sekali dimana pada penelitian saya pada kesbangpol kabupaten kampar masih banyak nya ormas yang harus menyetorkan laporan kegiatannya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat untuk melakukan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan salah satunya tentang aturan yang mengatur Ormas belum ada di kabupaten Kampar sehingga tidak ada payung hukum yang menjadi batasan bagi Ormas dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, waktu menjadi faktor penghambat dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang mana tidak sinkronnya waktu antara pihak Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Ormas yang bisa menyebabkan tidak terlaksananya pembinaan sedangkan dalam haditianur (2022) dalam penelitiannya mengenai pembinaan ormas sudah memiliki peraturan walikota sungai-penuh nomor 35 tahun 2019.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Kampar mengenai Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembinaan yang diberikan kepada Ormas berupa peningkatan wawasan organisasi, penempatan program kerja, menumbuhkembangkan kepekaan anggota sebagai wadah, penampung aspirasi, penguatan visi dan misi organisasi kemasyarakatan. Dalam Pembinaan Ormas Kesbangpol melakukan berbagai proses mulai dari pendaftaran, pelaporan kegiatan Ormas, proses pengundangan Ormas untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi, sosialisasi Pembinaan Ormas yang menghadirkan Tokoh-tokoh serta generasi muda di kabupaten kampar. Kesbangpol juga melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan digitalisasi untuk memudahkan Ormas yang ingin mendaftarkan dirinya serta rapat evaluasi dengan pengelompokkan Ormas sesuai bidangnya guna menyambut pemilu 2024, tidak hanya itu Kesbangpol juga mengajak Ormas menggunakan *social media* untuk memberikan pandangan yang baik dari masyarakat. Hal ini dilakukan Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang tertib serta terjalinnya sinergitas yang baik antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mencapai Ketentraman dan Ketertiban umum, namun Pembinaan yang dilakukan Kesbangpol masih terdapat beberapa Faktor Penghambat mulai dari kurang tertibnya Ormas dalam kelengkapan Administrasi, Belum adanya Peraturan daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi payung hukum dan dasar Ormas dalam menjalankan Organisasinya, serta waktu dan tempat juga menjadi faktor penghambat dalam Pembinaan Organisasi kemasyarakatan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian sehingga informasi yang didapat masih sangat terbatas. Masih sangat kurang sampel data dari organisasi kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Kampar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Kampar, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, T. (2022). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019*. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34012>
- Rudi, S. (2018). *Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak*. Administrasi Publik. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/543>
- Santika, C. W. H. (2022). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10314>
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

